

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DAN TANTANGANNYA TERHADAP KETIMPANGAN PENDIDIKAN ANTAR DAERAH DI INDONESIA

Anne Mutia Azizah^{1*}, Arina Ridho Ghassani¹, Azka Putri Danliati¹, &
Nabila Azzahra Ramdhanian¹, Engkus Kustyana¹
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia¹
Email: annemutiaaz@gmail.com*

Riwayat Artikel

Diterima: 16 Mei 2026

Disetujui: 16 Juni 2026

Diterbitkan: 01 Juli 2026

Abstract

The implementation of the Merdeka Curriculum in Indonesia aims to address the phenomenon of learning loss through flexible and student-centered learning. However, its implementation continues to face various challenges, particularly regarding disparities in educational infrastructure, access to technology, and the quality of teaching personnel between urban areas and disadvantaged, frontier, and outermost (3T) regions. This study aims to explore and describe the dynamics of Merdeka Curriculum implementation amid regional resource disparities and their implications for educational quality gaps in Indonesia. The study employs a descriptive qualitative approach using secondary data analysis derived from literature, policy documents, government reports, and previous research. The findings indicate that although initiatives such as the Sekolah Penggerak Program provide opportunities to improve learning quality, their implementation remains uneven across regions. Limited digital access, inadequate educational resources, and differences in regional fiscal capacity influence the implementation process. These conditions may contribute to the Matthew Effect, where regions with greater resources progress more rapidly while disadvantaged regions continue to face significant barriers. Therefore, the success of the Merdeka Curriculum depends on equitable policy support through adaptive assistance for disadvantaged regions, improved teacher distribution, the provision of offline learning alternatives, and stronger coordination between central and local governments to ensure a more inclusive educational transformation.
Keywords: Merdeka Curriculum, Policy Implementation, Resource Disparity, Educational Inequality, Indonesian Education.

Abstrak

Implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia bertujuan untuk mengatasi fenomena learning loss melalui pembelajaran yang fleksibel dan berpusat pada peserta didik. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketimpangan infrastruktur pendidikan, akses teknologi, serta kualitas tenaga pendidik antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan berbagai dinamika implementasi Kurikulum Merdeka di tengah disparitas sumber daya antardaerah serta implikasinya terhadap kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program seperti Sekolah Penggerak memberikan peluang peningkatan kualitas pembelajaran,

pelaksanaannya belum merata di seluruh wilayah. Keterbatasan akses digital, minimnya ketersediaan sumber daya pendidikan, serta perbedaan kapasitas fiskal daerah menjadi faktor yang memengaruhi proses implementasi kebijakan. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan fenomena Matthew Effect, yaitu daerah yang telah memiliki sumber daya memadai cenderung berkembang lebih cepat dibandingkan daerah yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan dukungan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan, melalui pemberian bantuan yang lebih adaptif bagi daerah tertinggal, penguatan distribusi tenaga pendidik, penyediaan alternatif pembelajaran luring, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tujuan transformasi pendidikan dapat tercapai secara lebih inklusif.

Kata kunci: Kurikulum Merdeka, Implementasi Kebijakan, Disparitas Sumber Daya, Kesenjangan Pendidikan, Pendidikan Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjadi pilar utama pembangunan nasional. Dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menghadirkan Kurikulum Merdeka sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar untuk mengatasi fenomena *learning loss* atau penurunan capaian pembelajaran peserta didik. Kurikulum ini menekankan fleksibilitas pembelajaran, fokus pada materi esensial, serta penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila agar proses belajar lebih adaptif sesuai kebutuhan siswa. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam *Jurnal Basicedu*, Kurikulum Merdeka dirancang untuk menciptakan pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik dan memberikan ruang inovasi bagi guru dalam proses pembelajaran (Rahmadayanti, 2022).

Namun, implementasi Kurikulum Merdeka menghadapi tantangan besar karena kondisi pendidikan di Indonesia sangat beragam. Kebijakan pendidikan nasional yang diterapkan secara menyeluruh harus berhadapan dengan realitas geografis, ekonomi, dan infrastruktur pendidikan yang berbeda-beda. Sekolah di wilayah perkotaan umumnya memiliki akses teknologi, fasilitas pendidikan, dan kualitas tenaga pendidik yang lebih baik dibandingkan sekolah di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Sebaliknya, banyak sekolah di daerah terpencil masih mengalami keterbatasan sarana pendidikan, akses internet, serta rendahnya kesiapan guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis teknologi dan proyek. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa akses internet rumah tangga di Indonesia masih belum merata, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan timur Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan sumber daya pendidikan yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan Kurikulum Merdeka (BPS, 2019).

Perbedaan kesiapan antardaerah tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa implementasi Kurikulum Merdeka justru berpotensi memperlebar ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah dengan sumber daya yang memadai cenderung lebih mudah menerapkan pembelajaran inovatif dan fleksibel, sedangkan sekolah di daerah tertinggal masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan. Penelitian dalam *Jurnal Pendidikan dan Konseling* menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat dipengaruhi oleh kesiapan sarana prasarana, kompetensi guru, dan dukungan lingkungan sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa disparitas sumber daya antardaerah dapat mempengaruhi efektivitas penerapan kurikulum secara signifikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur dan kompetensi tenaga pendidik, tetapi juga menyangkut kemampuan setiap daerah dalam beradaptasi terhadap perubahan sistem

pembelajaran. Fleksibilitas yang menjadi ciri utama Kurikulum Merdeka memang memberikan ruang inovasi bagi sekolah, namun pada saat yang sama juga menuntut kesiapan sumber daya yang memadai. Akibatnya, sekolah di daerah maju cenderung lebih mudah mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi dan proyek, sedangkan sekolah di daerah tertinggal masih menghadapi berbagai keterbatasan dasar pendidikan. Perbedaan kesiapan tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan hasil belajar antarwilayah apabila tidak diimbangi dengan pemerataan dukungan pemerintah dan fasilitas pendidikan yang memadai. Dengan demikian, penting untuk menganalisis bagaimana disparitas sumber daya antardaerah mempengaruhi efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka serta apakah kebijakan ini mampu menciptakan pemerataan pendidikan atau justru memperbesar jurang kualitas pendidikan di Indonesia (Widhyastara & Purbakusuma, 2022).

B. KAJIAN PUSTAKA

Penerapan Kurikulum Merdeka menjadi salah satu bentuk reformasi pendidikan di Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus menciptakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini tidak hanya menuntut perubahan pada metode pembelajaran, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem birokrasi pendidikan. Oleh karena itu, kajian teori diperlukan untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif serta bagaimana ketimpangan pendidikan memengaruhi keberhasilan pelaksanaan Kurikulum Merdeka di berbagai daerah (Hartawan et al., 2023).

Diskursus Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan pendidikan yang menekankan pembelajaran berdiferensiasi, asesmen diagnostik, dan pengembangan kompetensi siswa sesuai kebutuhan individu. Melalui pendekatan ini, siswa diberikan kesempatan untuk belajar sesuai kemampuan dan minatnya, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pembelajaran secara aktif dan kolaboratif. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru menyesuaikan strategi, materi, dan metode evaluasi berdasarkan karakteristik belajar siswa. Selain itu, asesmen diagnostik digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sehingga proses pembelajaran dapat dirancang lebih efektif. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mengurangi kesenjangan hasil belajar antar peserta didik. Namun, implementasi Kurikulum Merdeka masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Keterbatasan akses teknologi, kurangnya pelatihan guru, serta minimnya fasilitas pendidikan menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Teori Implementasi Kebijakan

Untuk menganalisis pelaksanaan Kurikulum Merdeka, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

- **Komunikasi**

Komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan disampaikan secara jelas dan konsisten kepada pelaksana kebijakan. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, komunikasi diperlukan agar sekolah, guru, dan dinas pendidikan memahami tujuan serta mekanisme pelaksanaan kurikulum secara tepat. Kurangnya sosialisasi yang efektif dapat menyebabkan perbedaan pemahaman antar sekolah, khususnya di daerah pelosok.

- **Sumber Daya**

Sumber daya meliputi tenaga pendidik, anggaran, fasilitas, teknologi, dan informasi

yang mendukung implementasi kebijakan. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka membutuhkan guru yang kompeten, akses teknologi digital, serta pelatihan yang memadai. Ketimpangan sumber daya antara sekolah di perkotaan dan daerah terpencil menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan.

- Disposisi

Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan kesiapan pelaksana kebijakan dalam menjalankan program pemerintah. Guru dan tenaga pendidikan yang memiliki sikap positif terhadap perubahan kurikulum cenderung lebih mudah menerapkan pembelajaran inovatif. Sebaliknya, resistensi terhadap perubahan dapat menghambat implementasi kebijakan.

- Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme koordinasi, prosedur kerja, dan pembagian wewenang antar lembaga pelaksana kebijakan. Implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan koordinasi yang baik antara Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan daerah, dan pihak sekolah agar kebijakan dapat berjalan secara efektif. Struktur birokrasi yang terlalu kompleks dapat memperlambat proses pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Selain teori Edward III, penelitian ini juga dapat didukung oleh teori implementasi kebijakan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Teori ini menekankan pentingnya standar kebijakan, hubungan antar organisasi, kondisi sosial ekonomi, serta karakteristik pelaksana dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana kebijakan. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, faktor-faktor tersebut sangat relevan karena keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kesiapan sekolah, dukungan pemerintah daerah, serta kondisi sosial masyarakat di masing-masing wilayah.

Konsep Ketimpangan Pendidikan

Ketimpangan pendidikan menunjukkan adanya perbedaan akses dan kualitas pendidikan antar wilayah maupun kelompok sosial. Kondisi ini dapat dilihat dari perbedaan fasilitas sekolah, kualitas tenaga pendidik, serta akses terhadap teknologi pembelajaran. Sekolah di wilayah perkotaan umumnya memiliki sarana yang lebih lengkap dibandingkan sekolah di daerah terpencil sehingga peluang siswa untuk memperoleh pendidikan berkualitas juga berbeda.

Dalam perspektif teori reproduksi sosial, sistem pendidikan dapat memperkuat ketidaksetaraan sosial apabila akses terhadap pendidikan berkualitas tidak tersedia secara merata. Ketimpangan tersebut menyebabkan siswa dari daerah dengan keterbatasan sumber daya memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk mencapai hasil belajar yang optimal.

Berkaitan dengan hal tersebut, implementasi Kurikulum Merdeka menjadi tantangan tersendiri karena keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesiapan masing-masing daerah. Meskipun kebijakan ini bertujuan menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif dan fleksibel, perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur dapat menyebabkan implementasi yang tidak merata. Oleh sebab itu, analisis terhadap implementasi kebijakan dan ketimpangan pendidikan penting dilakukan untuk memahami efektivitas Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia (Mubarak et al., 2020).

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif

analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai implementasi kebijakan pendidikan, khususnya penerapan Kurikulum Merdeka di Indonesia, sehingga berbagai tantangan pelaksanaannya dapat dianalisis berdasarkan kondisi nyata di lapangan (Creswell, 2009). Sementara itu, penelitian deskriptif analitis digunakan untuk mendeskripsikan fakta-fakta terkait penerapan Kurikulum Merdeka serta menganalisisnya menggunakan teori implementasi kebijakan, seperti teori implementasi kebijakan George Edward III dan Van Meter & Van Horn.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber relevan dan kredibel. Sumber data meliputi dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan implementasi Kurikulum Merdeka dan ketimpangan pendidikan di Indonesia. Literatur yang digunakan berupa jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku kebijakan pendidikan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu implementasi kebijakan pendidikan dan kesenjangan pendidikan antardaerah.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh (Miles et al., 2014), yang terdiri atas empat tahapan. Tahap pertama adalah pengumpulan data, yaitu menghimpun berbagai literatur, dokumen kebijakan, dan data statistik mengenai implementasi Kurikulum Merdeka serta ketimpangan pendidikan antardaerah. Tahap kedua adalah reduksi data, yaitu proses menyaring dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian serta mengesampingkan data yang tidak berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan. Tahap ketiga adalah penyajian data (*data display*), yaitu menyusun data dalam bentuk tabel komparasi dan narasi analitis, seperti perbandingan fasilitas pendidikan antara wilayah Jawa dan luar Jawa, yang kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), yaitu merumuskan jawaban atas permasalahan penelitian serta menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti dokumen pemerintah, jurnal akademik, laporan penelitian, dan media massa kredibel guna memperoleh informasi yang lebih objektif dan konsisten (Patton, 2015). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan triangulasi teori dengan memanfaatkan lebih dari satu perspektif teori implementasi kebijakan untuk menganalisis permasalahan yang sama sehingga hasil penelitian menjadi lebih mendalam dan komprehensif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Implementasi Kurikulum Merdeka di Level Nasional

Adopsi Platform Merdeka Mengajar (PMM) sebagai Pusat Sumber Daya Guru

Penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) untuk meningkatkan kemampuan guru di Sekolah adalah langkah strategis untuk mendukung pembelajaran berkualitas tinggi. Pelatihan sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan PMM karena guru perlu memahami secara menyeluruh fitur PMM dan dapat mengintegrasikannya dalam kegiatan pembelajaran mereka (Ramdani et al., 2022).

Platform Merdeka Mengajar akan menjadi mitra guru dalam proses mengajar dan membantu mereka berinovasi dalam membuat pembelajaran yang relevan dengan tantangan. Oleh karena itu, platform mengajar bebas (PMM) adalah aplikasi yang memungkinkan guru memanfaatkan kemampuan siswa mereka. PMM bertujuan untuk membantu guru meningkatkan kemampuan profesional mereka, menyediakan sumber belajar yang relevan, dan menciptakan ekosistem kerja sama pendidik (Rahmawati & Gresinta, 2024).

Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Konteks Kearifan

Lokal

Profil pelajar Pancasila memperhatikan faktor internal yang berkaitan dengan jati diri, ideologi, dan cita-cita bangsa Indonesia, serta faktor eksternal yang berkaitan dengan konteks kehidupan dan tantangan bangsa Indonesia di abad ke-20. Kompetensi profil pelajar Pancasila melengkapi pencapaian Standar Kompetensi Lulusan dalam hal penanaman karakter nilai-nilai Pancasila. Tujuan ini selaras dengan nilai yang dibangun dalam pendidikan Kepramukaan. Selain itu, tujuan ini sesuai dengan nilai yang ditanamkan dalam pendidikan kepramukaan. Profil pelajar Pancasila memiliki beragam kompetensi yang disusun dalam enam dimensi. Kompetensi ini mencakup faktor internal yang berkaitan dengan jati diri, ideologi, dan cita-cita bangsa Indonesia serta faktor eksternal yang berkaitan dengan konteks kehidupan dan tantangan bangsa Indonesia di abad ke-21 yang sedang menghadapi revolusi industri 4.0. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah enam dimensi tersebut. Berkebinekaan secara global, bergotong royong, mandiri dan kritis serta novatif. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang konsisten, enam dimensi tersebut harus berkembang secara bersamaan karena saling berhubungan dan menguatkan satu sama lain (BSKAP, 2024).

Istilah "kearifan lokal" mengacu pada aspek budaya yang membentuk identitas sebuah masyarakat, yang tercermin dalam bahasa mereka dan dalam kehidupan sehari-hari karena sangat penting bagi kehidupan lokal (Unang Wahidin, Muhamad Sarbini, 2022). Kegiatan P5 sangat penting untuk memperkenalkan peserta didik pada warisan budaya lokal dan membantu mereka melestarikan budaya lokal. Pendidikan yang berlandaskan kearifan lokal menggunakan pendekatan di mana peserta didik diajak untuk tetap terhubung dengan realitas sehari-hari yang mereka alami. Diharapkan peserta didik dapat mengenal makanan Jepara dan melestarikan budaya lokal dengan kegiatan ini. Kegiatan P5 sangat penting untuk memperkenalkan peserta didik dengan budaya lokal. Ini juga membantu menanamkan nilai-nilai kearifan lokal, yang sesuai dengan karakteristik siswa Pancasila (Dewi et al., 2024).

Analisis keberhasilan Sekolah Penggerak di Wilayah Pilot Project

Analisis keberhasilan Sekolah Penggerak di wilayah pilot proyek menunjukkan bahwa program ini umumnya berhasil pada aspek proses implementasi dan hasil awal pembelajaran. Namun, seperti yang ditunjukkan dalam studi evaluasi CIPP pada SDN 17 Laing Kota Solok, pelaksanaan program dinilai sudah sesuai pada konteks, input, proses, dan produk, dengan peningkatan pada literasi, numerasi, dan modul ajar berbasis digital. Di SDN 17 Laing Kota Solok, evaluasi CIPP menunjukkan bahwa pelaksanaan program sudah sesuai dengan konteks, input, proses, dan produk. Ada peningkatan dalam literasi dan numerasi, modul ajar berdiferensiasi, dan praktik guru dan siswa. Studi tambahan tentang pelaksanaan P5 di Sekolah Penggerak menunjukkan bahwa program sedang berjalan di tahap implementasi, meskipun proyek masih menghadapi tantangan dan diperlukan perbaikan di lapangan (Nengsih et al., 2024).

Laporan tinjauan bukti PSKP menekankan bahwa program Sekolah Penggerak menunjukkan kemajuan positif sekaligus membuka peluang untuk transformasi sekolah yang lebih baik. Keberhasilan Sekolah Penggerak di wilayah pilot proyek biasanya ditunjukkan oleh peningkatan kompetensi guru, hadirnya pembelajaran berdiferensiasi, penguatan proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, dan perbaikan pengelolaan sekolah berbasis data. Selain itu, laporan tinjauan bukti PSKP menekankan bahwa program ini menunjukkan kemajuan positif dan bahwa ada peluang yang lebih baik untuk melaksanakan transformasi sekolah (Sigalingging, 2021).

Salah satu kendala yang paling sering dilaporkan adalah peningkatan kualitas SDM, keterbatasan fasilitas TIK, dan variasi dalam kesiapan sekolah untuk menerapkan perubahan pembelajaran. Karena perbedaan kapasitas antar sekolah pada tahap pilot proyek, hasil

implementasi belum sepenuhnya merata (Nengsih et al., 2024). Secara umum, Sekolah Penggerak di wilayah pilot proyek dapat dianggap berhasil jika ukuran keberhasilannya adalah perubahan praktik pembelajaran, penguatan budaya sekolah, dan peningkatan output awal peserta didik. Namun, jika dilihat dari keberlanjutan dan keselarasan, program ini masih membutuhkan bimbingan, peningkatan kapasitas guru, dan dukungan infrastruktur yang lebih konsisten (Susilo, 2025).

Anatomi Ketimpangan Pendidikan Antardaerah

Salah satu tantangan utama dalam implementasi Kurikulum Merdeka adalah kesenjangan digital antardaerah yang masih cukup tinggi. Kurikulum Merdeka mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, mulai dari asesmen digital, pemanfaatan platform pembelajaran, hingga pengembangan proyek berbasis teknologi. Namun, penerapan tersebut belum berjalan merata karena akses internet dan fasilitas digital di Indonesia masih timpang antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat penggunaan internet di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan, sehingga sekolah di daerah maju cenderung lebih siap menerapkan pembelajaran digital dibandingkan sekolah di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Kondisi tersebut menyebabkan implementasi Kurikulum Merdeka berjalan tidak seimbang antarwilayah dan berpotensi memperbesar kesenjangan kualitas pembelajaran (BPS, 2025).

Selain kesenjangan digital, distribusi guru kompeten juga menjadi faktor yang memperkuat ketimpangan pendidikan antardaerah. Guru dengan kompetensi tinggi, sertifikasi profesional, dan akses pelatihan lebih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan yang memiliki fasilitas pendidikan lebih baik. Sementara itu, sekolah di daerah terpencil masih mengalami keterbatasan tenaga pendidik serta minim akses terhadap pelatihan implementasi Kurikulum Merdeka. Penelitian dalam *Jurnal Pendidikan dan Konseling* menjelaskan bahwa kesiapan guru menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka, terutama dalam penggunaan metode pembelajaran diferensiasi dan pemanfaatan teknologi pendidikan. Ketimpangan kualitas tenaga pendidik tersebut menyebabkan kemampuan sekolah dalam menerapkan kurikulum baru menjadi berbeda-beda (Widhyastara, 2022).

Ketimpangan pendidikan juga dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung sarana dan prasarana pendidikan. Daerah dengan APBD yang besar cenderung lebih mampu menyediakan fasilitas penunjang pembelajaran seperti perangkat digital, pelatihan guru, dan akses internet sekolah. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas fiskal rendah sering kali masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. ANTARA News melaporkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka di daerah 3T dilakukan secara bertahap hingga 2028 karena masih terdapat kendala infrastruktur dan kesiapan sumber daya pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dukungan pendidikan yang memadai (Antara, 2024).

Tantangan Struktural dan Operasional

Tantangan struktural dan operasional dalam implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia masih menjadi persoalan yang cukup kompleks, terutama pada wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal). Berbagai kendala tersebut mencakup keterbatasan infrastruktur pendidikan, kesiapan sumber daya manusia, hingga perbedaan kultur belajar masyarakat yang secara langsung memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan Pendidikan.

Salah satu tantangan utama terletak pada keterbatasan infrastruktur pendidikan, khususnya di daerah terpencil. Implementasi Kurikulum Merdeka sangat berkaitan dengan penggunaan teknologi digital, baik dalam penyusunan modul ajar, pelaksanaan asesmen, maupun akses

terhadap platform pembelajaran. Namun, masih banyak sekolah yang menghadapi keterbatasan elektrifikasi, akses internet, serta perangkat teknologi pendukung pembelajaran. Kondisi tersebut menyebabkan proses digitalisasi pendidikan belum dapat berjalan secara optimal. Guru dan siswa di daerah dengan konektivitas rendah mengalami kesulitan dalam mengakses materi pembelajaran digital maupun platform pendidikan yang disediakan pemerintah. Ketimpangan infrastruktur ini pada akhirnya menciptakan perbedaan kualitas implementasi Kurikulum Merdeka antara sekolah di daerah maju dan daerah tertinggal (Fauziyah et al., 2025).

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi. Sekolah yang belum memiliki fasilitas memadai cenderung mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran inovatif sesuai tuntutan kurikulum baru (Oryandarini, 2024). Selain persoalan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi tantangan penting dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Guru dituntut untuk mampu memahami pembelajaran berdiferensiasi, asesmen diagnostik, serta penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, tidak semua guru memiliki tingkat literasi digital yang memadai, terutama di daerah dengan akses pelatihan yang terbatas. Beban administrasi digital juga dianggap memberatkan sebagian guru karena mereka harus menyesuaikan diri dengan berbagai platform pembelajaran dan sistem administrasi berbasis teknologi. Kondisi ini menyebabkan munculnya resistensi terhadap perubahan kurikulum, terutama pada guru yang belum terbiasa menggunakan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar (Fauziyah et al., 2025).

Penelitian lain menunjukkan bahwa guru masih mengalami kesulitan dalam menyusun asesmen diagnostik, modul ajar, serta menerapkan pembelajaran diferensiasi. Selain itu, perubahan pola pikir (*mindset*) guru dari metode pembelajaran konvensional menuju pembelajaran yang lebih fleksibel juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses adaptasi kurikulum. Kurangnya pelatihan berkelanjutan dan dukungan institusi turut memperbesar kesenjangan kualitas implementasi kurikulum antar daerah. Sekolah dengan akses pelatihan dan pendampingan yang baik cenderung lebih siap dalam menjalankan kebijakan dibandingkan sekolah di wilayah tertinggal. Faktor kultur belajar dan lingkungan sosial juga memengaruhi keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Di daerah maju, siswa umumnya memperoleh dukungan lebih besar dari keluarga dan lingkungan sekitar dalam proses pembelajaran. Orang tua memiliki akses informasi yang lebih baik, kemampuan ekonomi yang lebih stabil, serta fasilitas belajar yang lebih memadai.

Sebaliknya, di daerah tertinggal, dukungan orang tua terhadap proses pendidikan sering kali terbatas akibat kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan keluarga, maupun keterbatasan akses teknologi. Perbedaan lingkungan sosial tersebut menyebabkan adanya kesenjangan motivasi belajar dan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran berbasis proyek dan teknologi yang diterapkan dalam Kurikulum Merdeka. Selain itu, budaya belajar yang masih berorientasi pada metode konvensional membuat sebagian sekolah mengalami kesulitan dalam menerapkan konsep pembelajaran yang lebih mandiri dan fleksibel. Adaptasi terhadap perubahan kurikulum membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara optimal (Oryandarini, 2024).

Analisis Dampak : Peluang atau Ancaman

Penerapan Kurikulum Merdeka menimbulkan dua kemungkinan dampak terhadap ketimpangan pendidikan antardaerah di Indonesia. Di satu sisi, kebijakan ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai kebutuhan daerah. Namun di sisi lain, implementasinya juga berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan apabila kesiapan

setiap daerah berbeda-beda.

Dalam sudut pandang optimis, Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Sekolah tidak lagi sepenuhnya terikat pada sistem pembelajaran yang seragam, sehingga guru memiliki ruang lebih luas untuk mengembangkan materi berdasarkan potensi daerah dan kearifan lokal. Fleksibilitas tersebut dapat membantu sekolah di daerah tertinggal menciptakan pembelajaran yang lebih relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Selain itu, pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual dinilai mampu meningkatkan kreativitas guru serta partisipasi peserta didik dalam proses belajar. Penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka memang dirancang untuk memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam menerapkan pembelajaran yang lebih adaptif dan berpusat pada siswa (Yunita, 2025).

Namun demikian, terdapat pula kemungkinan dampak negatif yang dapat dijelaskan melalui konsep *Matthew Effect*. Konsep ini menggambarkan keadaan ketika pihak yang telah memiliki keunggulan akan berkembang semakin cepat, sedangkan pihak yang memiliki keterbatasan justru semakin tertinggal (Matjaz Perc, 2014). Dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka, sekolah-sekolah di daerah maju cenderung lebih mudah menjalankan kurikulum karena didukung fasilitas yang lengkap, akses teknologi yang baik, serta kualitas sumber daya manusia yang lebih memadai. Sebaliknya, sekolah di daerah tertinggal masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya akses internet, minimnya pelatihan guru, serta rendahnya ketersediaan sarana pembelajaran. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pelaksanaan Kurikulum Merdeka tidak berjalan secara optimal di seluruh wilayah sehingga kesenjangan pendidikan antardaerah berpotensi semakin melebar (Marlianti et al., 2026).

Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kesiapan antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka, terutama dalam penggunaan teknologi pembelajaran dan penerapan pembelajaran diferensiasi. Sekolah di perkotaan umumnya lebih siap karena memiliki dukungan sumber daya yang lebih baik dibandingkan sekolah di daerah rural atau tertinggal (Marlianti et al., 2025). Oleh sebab itu, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat dipengaruhi oleh pemerataan dukungan pemerintah, baik dalam bentuk pelatihan guru, penyediaan fasilitas pendidikan, maupun akses teknologi di seluruh daerah (Rosyana et al., 2026).

Dengan demikian, Kurikulum Merdeka dapat menjadi peluang sekaligus ancaman terhadap pemerataan pendidikan di Indonesia. Apabila implementasinya didukung secara merata, kurikulum ini berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan sesuai kebutuhan daerah. Akan tetapi, apabila kesenjangan fasilitas dan sumber daya pendidikan tidak segera diatasi, maka kebijakan tersebut justru dapat memperbesar ketimpangan pendidikan antardaerah.

Rekomendasi Kebijakan

Upaya untuk mengurangi ketimpangan pendidikan antardaerah dalam implementasi Kurikulum Merdeka dapat dilakukan melalui penerapan kebijakan asimetris (*asymmetric policy*). Kebijakan asimetris merupakan pendekatan yang memberikan perlakuan atau bentuk dukungan berbeda kepada setiap daerah sesuai dengan kondisi dan tingkat kebutuhannya. Pendekatan ini penting diterapkan karena kondisi pendidikan di Indonesia tidak berada pada tingkat kesiapan yang sama, baik dari segi infrastruktur, akses teknologi, kualitas tenaga pendidik, maupun kemampuan sekolah dalam menjalankan perubahan kurikulum (Pendidikan, 2024).

Dalam pelaksanaannya, kebijakan asimetris dapat diwujudkan melalui pemberian bantuan yang lebih besar kepada sekolah-sekolah di daerah tertinggal atau sekolah yang berada pada zona merah dalam Rapor Pendidikan. Bantuan tersebut dapat berupa penyediaan kuota internet,

perangkat digital, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta pelatihan guru yang lebih intensif. Dukungan tambahan ini diperlukan agar sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas tetap mampu menerapkan Kurikulum Merdeka secara optimal dan tidak tertinggal dibanding sekolah di daerah maju (Masri, 2024).

Selain itu, penerapan kebijakan yang berbeda pada setiap daerah dinilai lebih efektif dibanding penggunaan kebijakan yang seragam secara nasional. Hal ini karena setiap wilayah memiliki tantangan pendidikan yang berbeda-beda, sehingga strategi implementasi juga perlu disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing daerah. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat memberikan solusi yang lebih tepat sasaran untuk membantu sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperkecil kesenjangan pendidikan antardaerah (Pendidikan, 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat dipengaruhi oleh kesiapan fasilitas pendidikan, kompetensi guru, dan dukungan teknologi pembelajaran. Apabila sekolah di daerah tertinggal tidak memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya, maka kesenjangan pendidikan antardaerah berpotensi semakin meningkat. Oleh karena itu, kebijakan asimetris menjadi salah satu langkah penting untuk menciptakan pemerataan pendidikan dan memastikan seluruh sekolah memiliki kesempatan yang setara dalam menjalankan transformasi pendidikan nasional (Masri, 2024).

Untuk mengurangi ketimpangan pendidikan antardaerah dalam implementasi Kurikulum Merdeka, pemerintah perlu memperkuat pemerataan sumber daya manusia pendidikan melalui redistribusi guru berkualitas dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik di daerah terpencil. Program pelatihan guru perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi, pembelajaran berbasis proyek, dan pemanfaatan teknologi dapat berkembang secara lebih merata. Selain itu, pemerataan penempatan guru juga penting agar sekolah di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) tidak terus mengalami kekurangan tenaga pendidik yang kompeten. Penguatan komunitas praktisi guru baik secara daring maupun luring juga perlu dikembangkan untuk mendukung kolaborasi dan pertukaran metode pembelajaran antardaerah sehingga kualitas implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan lebih seimbang. Dengan adanya peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik, sekolah di berbagai daerah diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menerapkan sistem pembelajaran yang fleksibel dan berpusat pada peserta didik sesuai prinsip Kurikulum Merdeka.

Selain peningkatan kualitas tenaga pendidik, pemerintah juga perlu memperkuat pembangunan infrastruktur pendidikan dan akses teknologi di daerah tertinggal. Penyediaan akses internet, perangkat digital, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pembelajaran yang memadai perlu diprioritaskan agar sekolah di daerah terpencil mampu menerapkan pembelajaran berbasis teknologi secara optimal. Pemanfaatan platform pembelajaran daring juga dapat membantu siswa dan guru memperoleh akses sumber belajar yang lebih luas meskipun berada di wilayah dengan keterbatasan fasilitas pendidikan. Di samping itu, dukungan anggaran pendidikan dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat juga diperlukan untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan antardaerah. Dengan adanya pemerataan kualitas guru serta dukungan infrastruktur pendidikan yang memadai, implementasi Kurikulum Merdeka diharapkan dapat berjalan lebih inklusif dan mampu mengurangi ketimpangan pendidikan antardaerah di Indonesia (Sleman, 2024).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan implementasi Kurikulum Merdeka adalah melalui lokalisasi konten pada Platform Merdeka Mengajar (PMM). Kebijakan ini penting karena tidak seluruh wilayah di Indonesia memiliki akses internet yang stabil, khususnya daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal). Ketergantungan

terhadap sistem digital menyebabkan guru dan siswa di daerah dengan keterbatasan konektivitas mengalami kesulitan dalam mengakses materi pembelajaran, pelatihan guru, maupun perangkat ajar berbasis digital. Lokalisasi konten PMM dapat dilakukan dengan menyediakan materi ajar dalam bentuk *non-digital* atau *offline* yang dapat digunakan tanpa koneksi internet. Materi tersebut dapat berupa modul cetak, video pembelajaran dalam perangkat penyimpanan lokal, buku panduan guru, hingga aplikasi pembelajaran yang dapat diakses secara luring (*offline mode*). Dengan demikian, sekolah di daerah dengan keterbatasan jaringan tetap dapat menjalankan implementasi Kurikulum Merdeka secara optimal (Fauziyah et al., 2025).

Selain itu, materi pembelajaran juga perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya daerah masing-masing agar lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik. Kontekstualisasi materi ajar dapat membantu siswa memahami pembelajaran melalui contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Pendekatan ini juga mendukung prinsip pembelajaran inklusif yang menjadi salah satu tujuan utama Kurikulum Merdeka. Pemerintah daerah dan satuan pendidikan juga dapat bekerja sama dalam mendistribusikan perangkat ajar luring kepada sekolah-sekolah yang belum memiliki akses teknologi memadai. Dukungan berupa pelatihan penggunaan media pembelajaran offline bagi guru menjadi langkah penting agar materi dapat dimanfaatkan secara efektif dalam proses pembelajaran. Melalui lokalisasi konten PMM, diharapkan kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah tertinggal dapat dikurangi sehingga implementasi Kurikulum Merdeka berjalan lebih merata di seluruh wilayah Indonesia (Dewi et al., 2025).

Sinkronisasi pusat pendidikan di seluruh wilayah Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kebijakan nasional dapat diterapkan secara merata, terutama di daerah terpencil. Dalam konteks ini, peran pengawas sekolah tidak lagi hanya sebagai pengawas konvensional, tetapi juga sebagai fasilitator kolaboratif yang mampu menjadi jembatan pendampingan teknis bagi sekolah-sekolah di daerah.

Berdasarkan Peraturan Dirjen GTK No. 481 Tahun 2023, pengawas sekolah saat ini berfokus pada pendampingan siklus yang meliputi perencanaan, pengawasan program sekolah, pelaksanaan, hingga pelaporan refleksi. Pendekatan tersebut menekankan profesionalisme, kerja sama dengan kepala sekolah, serta penerapan pendekatan asimetris yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah, termasuk sekolah di wilayah terpencil. Konsep ini juga sejalan dengan Permenpan-RB No. 1 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa pengawas berfungsi sebagai mitra independen, bukan sebagai pengontrol yang bersifat hierarkis. Dengan demikian, pengawas diharapkan mampu membangun hubungan pendampingan yang lebih kolaboratif dan suportif dalam implementasi kebijakan pendidikan (Kemendikdasmen, 2023).

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan untuk menyamakan visi Renstra Kemendikbud, mencegah terjadinya perbedaan interpretasi kebijakan, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Namun, sinergi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan akses dan sumber daya di wilayah terpencil. Oleh karena itu, pengawas sekolah memiliki peran penting dalam menyesuaikan arahan kebijakan pusat, seperti implementasi Kurikulum Merdeka, dengan kebutuhan dan kondisi lokal di masing-masing daerah (Kemendikdasmen, 2020).

Dalam upaya memperkuat peran pengawas sekolah, diperlukan beberapa strategi pendukung. Salah satunya melalui pelatihan khusus bagi pengawas di wilayah terpencil dengan melakukan sosialisasi prinsip-prinsip pendampingan yang terencana, bertahap, dan berbasis evaluasi melalui platform nasional. Selain itu, pemanfaatan platform digital kolaboratif juga penting untuk mendukung sinkronisasi data secara real-time antara Dinas Pendidikan daerah dan Kementerian Pendidikan di tingkat pusat. Penggunaan aplikasi refleksi dan pelaporan

diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi serta monitoring pelaksanaan kebijakan pendidikan (Kemendikdasmen, 2023).

Penguatan lainnya dapat dilakukan melalui pembentukan komunitas belajar lintas tingkat dengan melibatkan pengawas dalam pembinaan Program Pendidikan Agama Islam (PAI) maupun Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di sekolah terpencil. Melalui pendekatan ini, pengawas dapat menggunakan peta kelemahan sekolah sebagai dasar dalam menentukan bentuk intervensi dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dengan adanya kolaborasi yang terstruktur antara pengawas, sekolah, dan pemerintah daerah, diharapkan pemerataan kualitas pendidikan dapat berjalan lebih optimal (Nasional, 2024).

E. SIMPULAN

Implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia merupakan upaya transformatif untuk mengatasi learning loss melalui pembelajaran yang fleksibel dan berpusat pada siswa, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi tantangan serius berupa ketimpangan pendidikan antardaerah. Analisis berdasarkan teori George C. Edward III menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, di mana saat ini masih terdapat jurang lebar terkait fasilitas digital, kompetensi guru, dan kapasitas fiskal antara wilayah perkotaan dengan daerah 3T. Kondisi ini berpotensi memicu *Matthew Effect*, di mana daerah maju berkembang semakin pesat sementara daerah tertinggal semakin tertinggal akibat keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan asimetris yang melibatkan bantuan intensif bagi daerah tertinggal, redistribusi guru berkualitas, lokalisasi konten pembelajaran secara luring, serta penguatan peran pengawas sekolah sebagai fasilitator kolaboratif untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan nasional.

REFERENSI

- Ade Ray Adhyatma Widhyastara, A. I. M. (2026). Analisis Bauran Pemasaran (Marketing Mix) pada PT. Jaya Medika Karunia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(2685–9351).
- Antara. (2024). *Penerapan Kurikulum Merdeka di daerah 3T bertahap hingga 2028*.
- BADAN STANDAR, KURIKULUM, D. A. P. ... INDONESIA, R. (2024). *Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila*.
- BPS. (2019). Proporsi Individu Yang Menggunakan Internet Menurut Provinsi (Persen), 2019. *Badan Pusat Statistik*.
- BPS. (2025). [Metode Baru] Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Hasil Long Form SP2020 (Tahun), 2025. *Badan Pusat Statistik*.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Dewi Rahmadayanti, A. H. (2022). Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *JURNAL BASICEDU*, 6.
- Dian Oryandarini, M. M. (2024). HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI GURU DALAM IMPLEMENTASIKURIKULUM MERDEKADI SMK N 3 YOGYAKARTA. *Journal of Electronics and Education (JEED)*.
- Dona Nengsih, Abhandia Amra, Demina, Sirajul Munir, J. (2024). EVALUASI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DENGAN MODEL CIPP DI SDN 17 LAING KOTA SOLOK. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.
- Fauziyah, Radeni Sukma Indra Dewi, I. S. R. (2025). ANALISIS HAMBATAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA: STUDI KASUS PEMAHAMAN DAN KETERAMPILAN DIGITAL GURU. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.

- Kemendikdasmen. (2020). *Pentingnya Sinkronisasi Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan*.
- Kemendikdasmen. (2023). *Mengenal 4 Siklus Pendampingan oleh Pengawas Sekolah*.
- Masri, R. (2024). Implementasi kebijakan pendidikan kurikulum merdeka belajar. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*.
- Matjaz Perc. (2014). The Matthew effect in empirical data. *Journal Of The Society Interface*.
- Miles, M. B.; Huberman, A. M.; Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Mubarok, Zahuar, Setyowati, S. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*.
- Mutia Dewi, Novia Ballianie, Mardia Astuti, Halimatussakdiah, Siti Fatimahi, G. P. I. S. (2025). Tantangan Implementasi Kurikulum Di Era Digital: Kesiapan Guru Dan Infrastruktur. *Journal Of Social Science Research*.
- Nasional, P. (2024). *Pendampingan Penyusunan Program PAI*.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. SAGE Publications.
- Pendidikan, P. D. (2024). *Implementasi Kurikulum Merdeka dan Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi Peserta Didik*.
- Rahmah Yunita, W. (2025). Implementation of the Merdeka Curriculum in MTs Level: Evaluative Review of Countenance Stake Model. *Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*.
- Rahmawati, Efri Gresinta, S. (2024). Platform Merdeka Mengajar sebagai Inovasi dalam Dunia Pendidikan. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND MANAGEMENT STUDIES (IJOSMAS)*.
- Rahmawati Kumala Dewi, Syailin Nichla Choirin Attalina, H. (2024). ANALISIS KEGIATAN PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5) DENGAN TEMA KEARIFAN LOKAL KABUPATEN JEPARA DI SEKOLAH DASAR. *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*.
- Ramdani, Yulianti, Rahmatulloh, S. (2022). Penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) pada Guru Sekolah Dasar. *Journal of Instructional and Development Researches*.
- Rolifola Cahya Hartawan, Fitriyani Kosasih, R. (2023). Implementation of the Van Meter and Van Horn Zoning System Policies Model. *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)*, 2.
- Rosyana Marlianti, Susi Astiantih, Syarif Hidayat Nasir, Z. Z. (2026). Bridging Urban and Rural Contexts: A Comparative Case Study of English Teachers' Implementation of the Merdeka Curriculum. *Jurnal Paedagogy*.
- Sigalingging, R. (2021). *PENERAPAN PEMBELAJARAN PARADIGMA BARU*.
- Sleman, M. 8. (2024). *Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Indonesia: Tantangan, Peluang, dan Solusi*.
- Susilo, M. (2025). Evaluasi Program Sekolah Penggerak dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal El Makrifat Kajian Pendidikan Dan Keislaman*.
- Unang Wahidin, Muhamad Sarbini, I. T. (2022). Evaluasi Penggunaan Media Pembelajaran Dalam Praktik Pengalaman Lapangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*.